

Cooperation between Bandung City Archives and Library Office with KPK RI in Anti-Corruption Agenda: Achieving Community Welfare Through ACLC (Anti Corruption Learning Center) Corner

Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung dengan KPK RI dalam Agenda Anti Korupsi: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pojok ACLC (Anti Corruption Learning Center)

Meskia Tania Fisalsabila¹, Tine Silvana¹

¹ Universitas Padjadjaran

*Corresponding author, e-mail: meskia21001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Collaboration within the library sector has become a vital initiative to address the limitations of public libraries in providing information, particularly regarding anti-corruption resources. To bridge this information gap, KPK RI initiated a partnership with the Bandung City Archives and Library Office. This study aims to explore the role of this collaboration in promoting community welfare through the establishment of the Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Corner. A qualitative research methodology with descriptive analysis was employed, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and literature reviews. The research findings reveal that the inception of the ACLC Corner is geared towards promoting anti-corruption literacy and education by disseminating knowledge about the dangers of corrupt practices and preventive measures from an early age. The program aspires to equip the community with comprehensive insights into corruption and encourages active participation in its prevention, with a focus on reducing corruption cases, particularly in Bandung. Although the program is currently a collaborative effort between the two entities, it is expected to, in the short term, enhance public understanding of corruption and its ramifications within the community of Bandung.

Keywords: Library cooperation, Anti-corruption literacy, Anti-corruption education, Library corner

Abstrak

Kolaborasi di sektor perpustakaan telah menjadi inisiatif penting untuk mengatasi keterbatasan perpustakaan umum dalam menyediakan informasi, khususnya terkait sumber daya antikorupsi. Untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut, KPK RI menginisiasi kerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kolaborasi ini dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pendirian Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Corner. Metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan tinjauan literatur. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pendirian Pojok ACLC bertujuan untuk mempromosikan literasi dan pendidikan antikorupsi dengan menyebarluaskan pengetahuan tentang bahaya praktik korupsi dan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Program ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan wawasan yang komprehensif tentang korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahannya, dengan fokus pada pengurangan kasus korupsi, khususnya di Bandung. Meskipun program ini merupakan upaya kolaboratif antara kedua entitas, diharapkan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pemahaman publik tentang korupsi dan dampaknya di masyarakat Bandung.

Kata kunci: Kerja sama perpustakaan, Literasi antikorupsi, Pendidikan antikorupsi, Pojok Perpustakaan



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Introduction

Informasi menjadi sebuah entitas yang kehadirannya selalu dibutuhkan, apalagi dengan adanya perkembangan era dan kondisi sosial masyarakat, membuat informasi hadir sebagai solusi yang dibutuhkan masyarakat dalam pemecahan masalah. Perpustakaan sebagai salah satu lembaga informasi berperan penting dalam menyediakan akses ke informasi serta menyediakan layanan lainnya dalam rangka memuaskan kebutuhan pemustaka atas informasi. Oleh karenanya, perpustakaan semakin gencar melakukan pengembangan agar mampu memberikan layanan dan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyebaran informasi yang mumpuni. Akan tetapi, tentu ada batasan bagi perpustakaan dalam melakukan hal-hal tersebut, sehingga dibutuhkanlah kolaborasi atau kerjasama antara perpustakaan dengan lembaga informasi lainnya agar mampu memenuhi tuntutan di era informasi. Terkait kerjasama perpustakaan, Wibowo (2017) menjelaskan bahwa kerjasama adalah upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih perpustakaan, yang didasari oleh kesadaran akan pentingnya bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Kerjasama ini menjadi krusial karena tidak ada satupun perpustakaan yang dapat secara menyeluruh menyediakan seluruh informasi yang diperlukan (Anas & Nurislaminingsih, 2017).

Dalam kondisi korupsi yang masih merajalela di Indonesia, diperlukan upaya konkret untuk menangani permasalahan serius ini. Menurut data dari Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 yang disusun oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), tercatat 579 kasus korupsi yang melibatkan berbagai aktor telah ditindak sepanjang tahun 2022. Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia juga mengalami penurunan signifikan, turun dari skor 38 menjadi skor 34, dan menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara. Meskipun kasus korupsi seringkali dilakukan oleh pejabat negara dan daerah, tidak dapat diabaikan bahwa korupsi juga melibatkan remaja, termasuk pelajar di sekolah-sekolah. Kasus-kasus seperti suap ujian, penggelapan dana sekolah, dan tindakan korupsi lainnya yang melibatkan remaja adalah peringatan akan urgensi literasi anti-korupsi yang harus dimulai sejak dini.

Kasus-kasus korupsi yang melibatkan generasi muda menyoroti perlunya pendidikan anti-korupsi yang terintegrasi dalam kurikulum dan kehidupan sehari-hari para pelajar. Melihat kompleksitas masalah korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) telah merespons dengan berbagai program dan strategi untuk menurunkan tingkat korupsi di negara ini. Salah satu program unggulan mereka adalah KPK Corner, yang menjadi pintu gerbang utama untuk penyebaran pendidikan anti-korupsi melalui literasi. Program ini dirancang untuk mencapai generasi muda, memastikan mereka memahami dampak negatif korupsi, dan membantu mereka mengenali serta melaporkan tindakan korupsi.

Seiring berjalannya waktu, kerja sama literasi antikorupsi yang dilakukan oleh Perpustakaan KPK telah berkembang. Menurut Laporan Tahunan KPK 2022, ada 5 KPK Corner yang telah diinisiasi di berbagai perpustakaan kampus di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen Perpustakaan KPK untuk menyebarkan pendidikan antikorupsi di kalangan perguruan tinggi.

Selanjutnya, upaya KPK RI dalam menyelenggarakan literasi anti-korupsi juga diperluas melalui pembuatan Pojok ACLC sebagai hasil kolaborasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Ini menunjukkan bahwa KPK RI memandang literasi anti-korupsi sebagai sebuah agenda yang perlu diperluas ke seluruh Indonesia. Pojok ACLC adalah salah satu wujud nyata dari upaya tersebut, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi dan mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi. Pojok ACLC ini dapat ditemukan di Microlibrary Alun-Alun Kota Bandung, yang mana baru saja diresmikan pada 28 Agustus 2023 lalu. Bangunan ini memiliki desain yang menarik, dan memiliki koleksi sebanyak 7.058 eksemplar buku ditambah 600 buku tentang pendidikan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam upaya menjalankan gerakan literasi anti-korupsi di Indonesia, kita tidak hanya perlu melihat pada penyelenggaraan saat ini, tetapi juga penting untuk melakukan kajian analisis terhadap penelitian terdahulu yang telah memberikan pandangan berharga dalam memahami dinamika gerakan literasi ini.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah peneliti, termasuk Wa Ode Sumartini, Widijaya, Carina Serly Saputri, Gheraldine Dinanti, Rizska Dwi Kartika, Inov Santoso, Rifki Aryo Salgi Mulya, Nikein Tri Andjan, I Putu Fredika Putra, dkk dengan judul "Edukasi Pendidikan Antikorupsi dan Pojok Literasi di Panti Asuhan Daarul Ishlah" merupakan sebuah kegiatan pengabdian yang memberikan kontribusi berharga. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendidikan antikorupsi dan meningkatkan minat baca anak-anak di panti asuhan melalui pembentukan pojok literasi. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini berhasil meningkatkan semangat

belajar anak-anak dan pengetahuan mereka tentang pendidikan antikorupsi. Terbentuknya pojok literasi di panti asuhan memberikan sarana yang bermanfaat bagi anak-anak dalam meningkatkan minat baca mereka.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang adalah bahwa keduanya berfokus pada pendidikan dan literasi anti-korupsi. Penelitian terdahulu bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak-anak di panti asuhan melalui pendidikan antikorupsi dan pembentukan pojok literasi, sementara penelitian yang akan datang akan mengeksplorasi peran Pojok ACLC dalam meningkatkan literasi anti-korupsi masyarakat melalui kerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap isu anti-korupsi dan literasi. Adapun perbedaan utama antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang terletak pada konteks dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Panti Asuhan Daarul Ishlah dengan tujuan meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak-anak di panti asuhan melalui pendidikan antikorupsi dan pembentukan pojok literasi. Sedangkan penelitian yang akan datang akan berfokus pada peran Pojok ACLC (Anti Corruption Learning Center) dalam peningkatan literasi anti-korupsi di masyarakat melalui kerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Neneng Komariah, Encang Saepudin, dan Rizki Nurislaminingsih pada tahun 2021 berjudul "KPK Corner As A Library Service In Supporting Anti-Corruption Education In Telkom University Open Library" merupakan suatu tinjauan yang relevan. Penelitian ini mengkaji proses perolehan dan pengembangan KPK Corner di Telkom University Open Library. Melalui metode kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini memberikan wawasan tentang proses pengajuan proposal inisiatif, pendekatan kepada staf KPK yang terkait, dan pemberian hibah KPK Corner sebagai pengakuan atas upaya pendidikan anti-korupsi. Selanjutnya, pengelolaan, layanan, dan promosi KPK Corner menjadi tanggung jawab Open Library sebagai bukti semangat pengembangan perpustakaan melalui kerjasama. Keberhasilan Telkom University Open Library dalam mendapatkan KPK Corner memberikan inspirasi bagi perpustakaan lain dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan antikorupsi.

Kesamaan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Neneng Komariah, Encang Saepudin, dan Rizki Nurislaminingsih pada tahun 2021 dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang adalah bahwa keduanya berfokus pada isu anti-korupsi dalam konteks pendidikan. Kedua penelitian menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif untuk memahami dan menggambarkan aspek-aspek terkait dengan isu anti-korupsi. Selain itu, keduanya mengeksplorasi peran lembaga atau pojok yang didedikasikan untuk pendidikan anti-korupsi dan literasi anti-korupsi dalam masyarakat.

Namun, perbedaan utama adalah dalam konteks dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu difokuskan pada pengembangan "KPK Corner" di Telkom University Open Library dengan memeriksa proses perolehan dan pengelolannya. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang akan fokus pada peran "Pojok ACLC" dalam meningkatkan literasi anti-korupsi di masyarakat melalui kerjasama antara KPK RI dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Jadi, sementara keduanya berkaitan dengan pendidikan anti-korupsi, mereka beroperasi di konteks dan lokasi yang berbeda, mengkaji entitas yang berbeda, yaitu "KPK Corner" dan "Pojok ACLC," serta mungkin memiliki tujuan dan dampak yang berbeda.

Adapun Urgensi penelitian ini terwujud dalam Ketersediaan Literatur yang Terbatas. Keberadaan literatur terkait kerjasama antara perpustakaan dan KPK RI dalam rangka melakukan penyuluhan terkait pendidikan anti-korupsi di masyarakat masih terbatas. Dalam kajian analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu ini, kami menyoroti pentingnya mengisi kesenjangan dalam literatur ini untuk menguatkan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan literasi anti-korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menjadi inspirasi bagi instansi lain untuk turut serta dalam misi KPK RI dalam menanamkan benih-benih anti-korupsi di masyarakat, khususnya pada generasi muda. Dengan kerjasama antara perpustakaan dan lembaga terkait, upaya penyebaran pendidikan antikorupsi dapat diperluas dan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan dampak negatif korupsi. Artinya, penelitian ini bukan hanya menjadi landasan teoretis, tetapi juga sebuah dorongan untuk bertindak nyata dalam upaya memerangi korupsi dan membangun masa depan yang lebih transparan dan bersih. Dalam pandangan kami, penelitian ini menjadi tonggak penting dalam mendukung visi bersama menciptakan masyarakat yang peduli akan integritas dan memerangi korupsi.

Atas dasar permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat untuk menentukan fokus penelitian adalah bagaimana Program Pojok ACLC ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui agenda literasi anti-korupsi. Dengan demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang

kerjasama antara Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung dalam mengusung Pojok ACLC sehingga dapat diketahui peran Pojok ACLC dalam peningkatan literasi anti-korupsi di masyarakat.

Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif, sebagaimana yang diungkapkan menurut Sugiyono (dikutip dalam Kaenuwihanuloh dkk, 2021), adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti adalah instrumen kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dengan analisis data yang bersifat induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Objek penelitian dalam penelitian kualitatif mengacu pada situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen utama di antaranya, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity).

Sejalan dengan pendekatan deskriptif yang disampaikan oleh Akhmad (2015), pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menafsirkan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan memperhatikan dan mencatat sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan komprehensif tentang situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan deskriptif karena sesuai dengan kebutuhan penelitian yang ingin menggambarkan dan menganalisis fenomena secara menyeluruh dan mendalam.

Fokus penelitian ini adalah peran Pojok ACLC dalam kesejahteraan masyarakat melalui literasi anti-korupsi. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui instrumen-instrumen tersebut, peneliti bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana kerjasama ini dapat dilaksanakan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pengumpulan data, metode yang digunakan terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama, wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi dari para informan. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara mendalam melalui perspektif subyek dengan mengajukan pertanyaan (Newcomer, Hatry, dan Wholey, dalam Alamsyah dkk, 2023). Selama wawancara, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan keadaan atau situasi pada saat wawancara berlangsung. Kedua, observasi merupakan kegiatan terencana dan terfokus yang bertujuan untuk mengamati perilaku dan proses dalam suatu sistem dengan tujuan tertentu. Observasi juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan dasar dari sistem yang sedang diamati (Shidiq dkk, 2019). Ketiga, studi literatur digunakan untuk memperkaya pemahaman dan memeriksa teori serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Literatur ini diambil dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan, dan karya literatur lain yang berkaitan dengan kerjasama perpustakaan dan pendidikan anti-korupsi. Dalam rangkaian metodologi ini, peneliti akan menggabungkan wawancara, observasi, dan studi literatur untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang peran Pojok ACLC di Microlibrary Alun-Alun Kota Bandung.

Setelah data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah memproses data menggunakan teknik analisis data yang dijelaskan oleh Miles dan Hubberman (2002). Dalam proses ini, terdapat tiga tahapan yang diikuti secara berurutan: (1) Tahap Reduksi Data, tahap ini merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang dicatat selama pengumpulan data lapangan. Pada tahap ini, data diolah untuk menjadikannya lebih fokus dan mudah dipahami. (2) Tahap Penyajian Data, pada tahap ini, data yang telah melalui tahap reduksi disajikan dalam berbagai bentuk, seperti matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk-bentuk ini dirancang sedemikian rupa sehingga mereka dapat menggabungkan informasi yang terstruktur ke dalam format yang koheren dan mudah dipahami. (3) Tahap Penarikan Kesimpulan, tahap terakhir ini melibatkan pengambilan garis besar kesimpulan yang linear dari data yang telah disajikan sebelumnya. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan verifikasi ulang untuk memastikan kesesuaian antara berbagai data yang ada.

Results and Discussion

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung merupakan sebuah Lembaga Teknis Daerah yang memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara layanan perpustakaan dan arsip daerah yang secara profesional melakukan kegiatan pengelolaan karya tertulis, karya tercetak, dan karya rekam dengan sistem yang baku dalam upaya pemenuhan kebutuhan para pemustaka. Lembaga ini memiliki visi yaitu terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat dan penyelenggaraan kearsipan secara baku, dengan misi mewujudkan minat baca masyarakat, mewujudkan penyelenggaraan kearsipan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan kinerja yang akuntabel.

Dalam rangka memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung membuat berbagai program literasi sebagai upaya dalam meningkatkan minat baca masyarakat sekitar dari

berbagai aspek literasi. Adapun saat ini Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung tengah menjalankan program-program yang berkaitan dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dimana semua layanan perpustakaan akan dipusatkan pada pemustaka. Perpustakaan berusaha untuk mengadakan koleksi serta layanan yang disesuaikan dengan preferensi pemustaka. Tujuannya agar pemustaka bisa dan mau untuk terus mendatangi perpustakaan.

Sementara Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung telah berkomitmen untuk meningkatkan minat baca masyarakat sekitar melalui program-program literasi yang mengedepankan inklusi sosial, mereka juga telah meluncurkan inisiatif yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu program utama yang mendukung tujuan ini adalah Pelita Aksi, sebuah program edukasi dan literasi anti korupsi yang ditujukan khusus untuk generasi muda, termasuk anak-anak usia dini. Pelita Aksi bertujuan untuk membekali generasi muda dengan pemahaman mendalam tentang korupsi serta cara-cara untuk mencegahnya. Melalui program ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung berusaha membantu generasi muda memahami bahaya korupsi sejak dini, dengan harapan bahwa pemahaman ini akan menjadi dasar yang kuat untuk menghindari perilaku koruptif di masa depan.

Meskipun Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung telah aktif dalam program literasi anti-korupsi, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan informasi yang memadai tentang korupsi dan aspek-aspeknya. Untuk mengatasi hal ini, mereka telah berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) untuk menciptakan Pojok ACLC (Anti Corruption Learning Center). KPK RI sendiri telah lama berkomitmen untuk menjalankan pendidikan anti korupsi sebagai bagian penting dari misi mereka. Dengan kerjasama ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung berharap dapat mengatasi keterbatasan informasi mereka dan memberikan pemustaka akses ke sumber daya yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang korupsi, serta langkah-langkah pencegahannya. Pojok ACLC menjadi perpanjangan dari upaya bersama ini dan mewakili komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan terlibat dalam pencegahan korupsi.

Kerjasama ini terjadi karena KPK RI dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung memiliki agenda yang sejalan. Kedua pihak, dengan tekad yang kuat, ingin menjalankan program edukasi dan informasi mengenai anti-korupsi di Kota Bandung. Mereka melihat hal ini sebagai langkah penting dalam menciptakan sebuah pedoman bagi perpustakaan umum lainnya untuk segera memulai gerakan literasi dan pendidikan anti korupsi ini. Kerjasama ini diharapkan akan menjadi contoh inspiratif dan berhasil, memotivasi lembaga perpustakaan lain di wilayah dan di seluruh negeri untuk mengikuti jejak mereka dalam memberikan pemahaman yang lebih baik tentang korupsi serta cara mencegahnya. Dengan demikian, kerjasama ini tidak hanya akan memberi manfaat kepada warga Kota Bandung, tetapi juga akan menjadi model dalam upaya penyebaran edukasi anti-korupsi di seluruh Indonesia.

Kerjasama yang kuat antara KPK RI dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung memiliki tujuan yang sangat relevan dan penting. Dari observasi yang telah dilakukan, terungkap bahwa Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung telah berkomitmen untuk memelihara zona integritas dan telah menjadi bagian dari Pakta Integritas. Namun, mereka menyadari bahwa untuk mencapai integritas yang kuat, masyarakat juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu ini. Masyarakat harus mengetahui bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak benar, sekecil apapun tindakannya. Oleh karena itu, tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk menyebarkan pemahaman yang mendalam tentang korupsi dan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya integritas dan cara-cara untuk melawan korupsi. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pengetahuan yang kuat di kalangan masyarakat Kota Bandung, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melawan korupsi. Dengan cara ini, kerjasama ini tidak hanya akan memberi manfaat kepada warga Kota Bandung, tetapi juga akan menjadi model dan inspirasi bagi lembaga perpustakaan lain di seluruh negeri untuk mengambil tindakan serupa dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya integritas dalam masyarakat.

Untuk memberikan akses yang mudah kepada program Pojok ACLC (Anti Corruption Learning Center), Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung telah menempatkannya di salah satu sudut Microlibrary Alun-Alun Kota Bandung. Microlibrary ini terletak di Jl. Alun-Alun Timur, Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung. Perpustakaan ini resmi dibuka pada tanggal 28 Agustus 2023, dan merupakan bagian penting dari inisiatif Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Dilansir dari bandungbergerak.id, perpustakaan dengan konsep anti-korupsi ini diakui sebagai yang pertama di Indonesia. Di dalamnya tersedia sebanyak 7.058 eksemplar buku, dengan 600 buku di antaranya khusus didedikasikan untuk edukasi antikorupsi yang berasal dari KPK. Bagi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya, mengakses program Pojok ACLC dan sumber daya tentang edukasi antikorupsi yang

(Cooperation between Bandung City Archives and Library Office with KPK RI in Anti-Corruption Agenda: Achieving Community Welfare Through ACLC (Anti Corruption Learning Center) Corner)

sangat berharga ini sekarang menjadi lebih mudah dan nyaman berkat lokasinya yang strategis di Alun-Alun Kota Bandung.

Terkait dengan layanan yang disediakan oleh Pojok ACLC, penting untuk memahami bahwa layanan ini terbuka untuk umum, mencakup berbagai kelompok usia dan tingkat pendidikan. Bagi masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya, ini adalah sebuah sumber daya berharga untuk memahami dan melawan korupsi. Namun, ada juga fokus khusus pada generasi muda. Pojok ACLC dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak usia dini, termasuk anak TK, SD, dan SMP

Layanan di Pojok ACLC terbagi menjadi dua bagian rak yang menarik. Rak pertama berisikan koleksi bacaan yang ditujukan khusus untuk anak-anak. Di sini, tersedia buku cerita ilustrasi yang mengangkat tema anti-korupsi, dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pemahaman anak-anak. Selain itu, ada permainan seperti kartu kwartet yang berfungsi sebagai alat pembelajaran yang interaktif. Sementara itu, rak yang berada paling belakang diisi oleh koleksi yang ditujukan untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Koleksi ini termasuk kliping, laporan, buku pedoman, jurnal, dan sumber daya lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi dan informasi terkait anti-korupsi. Dengan cara ini, Pojok ACLC menawarkan layanan yang mencakup berbagai kelompok usia dan tingkat pendidikan, mempromosikan pemahaman dan pencegahan korupsi di seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memastikan bahwa program Pojok ACLC mencapai khalayak yang luas dan beragam, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung telah merancang strategi promosi yang efektif. Salah satu bentuk promosi yang dilakukan adalah melalui sistem undangan (invitation). Dalam hal ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mengirimkan surat undangan kepada sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah (PAUD, TK, SD, SMP) di Kota Bandung. Jadwal kunjungan program ke sekolah-sekolah tersebut telah ditentukan untuk memastikan penyelenggaraan program yang berkelanjutan.

Selain strategi undangan kepada sekolah-sekolah, promosi program juga diperluas melalui media sosial. Dengan cara ini, informasi tentang Pojok ACLC dan program literasi anti-korupsi dapat lebih luas diakses oleh masyarakat dan menjadi lebih terbuka bagi yang berminat. Melalui berbagai bentuk promosi ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung berharap program mereka dapat mencapai dan memengaruhi sebanyak mungkin individu, memperkuat kesadaran akan isu anti-korupsi, serta menginspirasi tindakan nyata dalam pencegahan korupsi.

Terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam kerjasama ini, meskipun program Pojok ACLC memiliki potensi besar dalam upaya literasi anti-korupsi, sejumlah kendala masih perlu diatasi. Dari hasil wawancara, ditemukan beberapa persoalan yang perlu diperhatikan secara mendalam. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran untuk mengadakan kegiatan atau menambah koleksi. Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan untuk memperluas program dan menyediakan lebih banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh pemustaka. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan upaya penggalangan dana tambahan atau kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kecukupan anggaran. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. Karena program ini dijalankan di Microlibrary Alun-Alun Kota Bandung, pihak Dinas Arsip dan Perpustakaan perlu menarik staf dari perpustakaan pusat (Disarpus) untuk berjaga atau piket di sana. Hal ini dapat menguras sumber daya SDM yang seharusnya digunakan untuk tugas-tugas lain. Diperlukan strategi yang efisien untuk mengatasi permasalahan ini, mungkin dengan melibatkan lebih banyak sukarelawan atau kerjasama dengan pihak lain yang memiliki minat dalam literasi anti-korupsi. Sarana dan prasarana yang mungkin belum memenuhi kenyamanan pengguna di Microlibrary Alun-Alun Kota Bandung juga menjadi perhatian. Untuk menjadikan program ini lebih sukses, perlu investasi dalam perbaikan sarana dan prasarana guna meningkatkan pengalaman pemustaka. Ini termasuk kenyamanan, keamanan, dan fasilitas yang mendukung kegiatan literasi.

Sementara program Pojok ACLC terus berkembang dan memberikan dampak positif dalam upaya literasi anti-korupsi di Kota Bandung, masih ada satu aspek penting yang harus diputuskan, yaitu cara mengukur kesuksesan program ini. Meskipun, hingga saat ini, metode atau kriteria evaluasi program Pojok ACLC masih menjadi subjek pembicaraan pada rapat koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini. Dalam upaya mengukur kesuksesan kerjasama dan program Pojok ACLC, pihak-pihak yang terlibat harus mempertimbangkan indikator dan metode evaluasi yang relevan. Beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab dalam proses ini adalah sejauh mana program telah meningkatkan pemahaman anti-korupsi di kalangan masyarakat, apakah terdapat peningkatan partisipasi dalam program, dan apakah sumber daya yang digunakan telah memberikan dampak yang diinginkan. Ketika cara pengukuran kesuksesan ini telah ditetapkan dan disepakati, maka program Pojok ACLC dapat lebih efektif dalam memonitor dan mengevaluasi dampaknya terhadap kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang anti-korupsi. Evaluasi yang sistematis akan membantu

menentukan langkah-langkah perbaikan dan memastikan bahwa program bergerak menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung memiliki harapan yang tinggi terkait keterlibatan masyarakat dalam mendukung program Pojok ACLC. Dalam hal ini, Dinas Arsip dan Perpustakaan berfokus pada pendidikan usia dini, terutama sekolah-sekolah PAUD dan SD. Harapan mereka adalah bahwa program ini dapat menginspirasi lebih banyak sekolah PAUD dan SD di Kota Bandung untuk berpartisipasi dalam upaya literasi anti-korupsi. Melalui kunjungan ke Microlibrary Alun-Alun Kota Bandung, para siswa akan dapat mengalami secara langsung permainan game anti-korupsi yang telah disiapkan oleh KPK. Harapannya adalah bahwa pengalaman ini akan merangsang minat mereka dalam memahami isu anti-korupsi sejak usia dini, membantu menciptakan generasi muda yang lebih peduli terhadap integritas dan pencegahan korupsi.

Selain itu, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung juga berharap bahwa orang tua dan wali siswa juga akan mendukung program ini dan berperan aktif dalam memberikan pemahaman lebih lanjut di rumah. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara lembaga pendidikan, perpustakaan, dan keluarga akan menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan literasi anti-korupsi di kalangan generasi muda Kota Bandung.

Melalui program Pojok ACLC dan kolaborasi yang kuat dengan KPK, telah disiratkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa program ini memiliki dampak yang sangat positif bagi masyarakat Kota Bandung. Salah satu dampak yang signifikan adalah peningkatan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, tentang tindakan korupsi. Dampak positif ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Program literasi anti-korupsi ini telah memberikan masyarakat Kota Bandung peluang untuk mengenal sejak dini mengenai tindakan korupsi dan betapa pentingnya melawannya. Kesadaran ini tidak hanya akan membentuk generasi muda yang lebih etis, tetapi juga akan berkontribusi pada tata kelola yang lebih baik, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan secara umum.

Dalam jangka panjang, diharapkan bahwa penanaman kesadaran dan pemahaman sejak usia dini terkait isu korupsi akan memberikan kontribusi dalam membentuk lingkungan sosial dan politik yang lebih transparan, jujur, dan akuntabel di Kota Bandung. Selain meningkatkan literasi anti-korupsi, kerjasama ini diharapkan mampu mendukung perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebagai tambahan, diharapkan pula bahwa upaya preventif ini akan mengarah kepada berkurangnya atau bahkan ketiadaan praktik korupsi di Kota Bandung, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, program Pojok ACLC dan kerjasama ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam hal kesejahteraan dan tata kelola kota tersebut.

Selain dampak jangka panjang ini, program Pojok ACLC juga memiliki dampak jangka pendek yang signifikan. Dalam jangka pendek, masyarakat Kota Bandung telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang korupsi, terutama melalui pendidikan anti-korupsi yang disediakan di sekolah-sekolah PAUD dan SD, serta melalui kunjungan ke Microlibrary Alun-Alun Kota Bandung. Dampak jangka pendek ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu korupsi, yang dapat berkontribusi pada peningkatan integritas dan pencegahan korupsi di sehari-hari.

Sementara harapan besar terkait dengan dampak positif yang dapat dihasilkan oleh program Pojok ACLC dan kerjasama ini telah disampaikan, penting untuk dicatat bahwa program ini masih dalam tahap kolaborasi. Saat ini, belum ada kerjasama dalam bentuk MOU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian tertulis yang mengikat program ini dalam jangka waktu tertentu.

Kendati demikian, upaya kolaboratif ini tetap memberikan manfaat nyata dalam pendidikan anti-korupsi di Kota Bandung. Walaupun belum ada perjanjian tertulis, program Pojok ACLC telah berhasil menyediakan akses penting dan edukasi anti-korupsi kepada masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa program ini mungkin perlu diperpanjang dan diintegrasikan lebih dalam ke dalam struktur pendidikan dan literasi di wilayah tersebut. Dalam diskusi lanjutan, pihak-pihak yang terlibat mungkin akan mempertimbangkan perluasan program ini dan penyusunan kerangka kerjasama yang lebih resmi.

Conclusion

Program Pojok ACLC adalah inisiatif edukasi anti korupsi yang lahir dari kolaborasi antara Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung serta KPK RI. Dengan tekad untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa depan, program ini bertujuan memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya. Sasaran

utamanya adalah generasi muda yang masih awam terhadap isu ini. Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya kajian literatur seputar kerjasama perpustakaan dengan KPK RI dalam penyebaran kesadaran anti-korupsi. Selain itu, program ini diharapkan akan menjadi sumber inspirasi bagi perpustakaan lain untuk memainkan peran serupa dalam wilayah masing-masing. Meskipun Pojok ACLC masih berada dalam tahap kolaborasi, harapannya adalah agar kerjasama ini dapat berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Bandung. Dengan demikian, program ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan kasus korupsi di kota ini, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel.

References

- Akhmad, K. A. (2015). "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro Di Kota Surakarta)." *DutaCom Journal*, 9(1):43-54. <https://ojs.udb.ac.id/index.php/dutacom/article/view/537/499>
- Agustino, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gerakan Literasi di Taman Baca Masyarakat Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara. *Jurnal Sosial Politik*, 5(1), 142. <https://doi.org/10.22219/sospol.v5i1.7890>
- Alamsyah, N. N., Sukaesih, & Kusnandar. (2023). Optimization of Archive Digitization at the Padjadjaran University Central Library. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 11(02), 64-71.
- Anas, R. F., & Nurislaminingsih, R. (2017). Otoritas Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah (Bpad) Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Koordinator Kerja Sama Dan Jaringan Jogja Library for All. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(1), 401-410. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23098>
- Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. In *Www.Antikorupsi.Org*. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf)
- Herdiana, I. (2023). Peresmian Microlibrary Alun-alun Bandung Menyisakan Benang Kusut Keberlanjutan Perpustakaan Bandung Bergerak. <https://bandungbergerak.id/article/detail/158706/peresmian-microlibrary-alun-alun-bandung-menyisakan-benang-kusut-keberlanjutan-perpustakaan>
- Indonesian Corruption Watch. (2022). *Annual Report ICW 2022*. <https://www.antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2022>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Tanamkan Literasi Antikorupsi Usia Dini, KPK Corner Hadir di Perpustakaan DKI Jakarta *Berita KPK*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3265-tanamkan-literasi-antikorupsi-usia-dini-kpk-corner-hadir-di-perpustakaan-dki-jakarta>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Tanamkan Literasi Antikorupsi Usia Dini, KPK Corner Hadir di Perpustakaan DKI Jakarta *Berita KPK*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3265-tanamkan-literasi-antikorupsi-usia-dini-kpk-corner-hadir-di-perpustakaan-dki-jakarta>
- Komariah, N., Saepudin, E., & Nurislaminingsih, R. (2021). KPK Corner as Library Service in Supporting Anti-Corruption Education in Telkom University Open Library. *Khazanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24252/v9i1a1>
- Miles, M. B., & Hubberman, M. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage Publication.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK. (2022). *Laporan Tahunan KPK 2022: Menebar Benih Anti-korupsi*. https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2022.pdf
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A., (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Vol. 53
- Sumartini, W. O., Saputri, C. S., Dinanti, G., Dwi, R., Santoso, I., Aryo, R., Mulya, S., Andjani, N. T., & Fredika, I. P. (2023). Edukasi Pendidikan Antikorupsi dan Pojok Literasi di Panti Asuhan Daarul Ishlah. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 5(September), 510-515.
- Wibowo, B. (2017). Kerjasama Perpustakaan Sebagai Upaya Institutional Empowerment di BPAD DIY. *Artikel Website BPAD DIY*, 29, 3. http://dpad.jogjaprovo.go.id/public/article/1462/1517555947_kerjasama-perpustakaan-sebagai-upaya-institutional-empowerment-di-bpad-diy.pdf
- Soraya, A. D., & Fitrat, I. (2023). KPK Sokong Literasi Antikorupsi di Microlibrary Alun-Alun Kota Bandung *Republika Jabar*. <https://rejabar.republika.co.id/berita/s04ed1432/kpk-sokong-literasi-antikorupsi-di-microlibrary-alunalun-kota-bandung>